



Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Ketimpangan Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Papua Barat Tahun 2020–2024

Nugroho Adhi Puspito, Asih Murwiati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

adhinugrohopuspito@gmail.com, asih.murwiati@feb.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses pendidikan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2020–2024, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup tujuh kabupaten di Papua Barat selama lima tahun, sehingga diperoleh 35 observasi. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat dan publikasi resmi terkait. Variabel independen terdiri atas akses pendidikan yang diukur menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan TPT, sedangkan variabel dependen adalah persentase penduduk miskin. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan regresi data panel dengan tahapan pemilihan model melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Gini berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien -5,587603 dan signifikansi 0,081. Akses pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien -4,029706 dan signifikansi 0,000. TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan koefisien -0,125557 dan signifikansi 0,038. Secara simultan, akses pendidikan, Rasio Gini, dan TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan $\text{Prob} > F$ sebesar 0,0001. Nilai R -squared within sebesar 0,8106 menunjukkan bahwa 81,06% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan Papua Barat berkaitan dengan kondisi pendidikan, ketimpangan, dan ketenagakerjaan secara bersama-sama. Temuan memberikan gambaran bahwa peningkatan akses pendidikan berperan penting dalam penurunan kemiskinan. Sementara itu, arah negatif TPT menunjukkan perlunya memperhatikan karakteristik pekerjaan masyarakat, termasuk sektor informal dan pekerjaan berpendapatan rendah, memahami hubungan pengangguran dan kemiskinan di wilayah penelitian.

Kata kunci: Akses Pendidikan; Rasio Gini; Pengangguran Terbuka; Kemiskinan; Papua Barat

Abstract

This study analyzes the effect of educational access, the Gini Ratio, and the Open Unemployment Rate on the poverty rate in West Papua Province from 2020 to 2024, both partially and simultaneously. The research uses a quantitative approach with panel data covering seven regencies over five years, resulting in 35 observations. Data were sourced from Statistics Indonesia of West Papua. The independent variables consist of educational access measured by Mean Years of Schooling, the Gini Ratio, and the Open Unemployment Rate, while the dependent variable is the percentage of poor population. Data were analyzed using descriptive statistics and panel data regression through model selection via Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results indicate that the Gini Ratio has a negative but insignificant effect on poverty, with a coefficient of -5.587 and a significance of 0.081. Educational access has a negative and significant effect, with a coefficient of -4.029 and a significance of 0.000. The unemployment rate also has a negative and significant effect, with a coefficient of -0.125 and a significance of 0.038. Simultaneously, all variables significantly affect poverty, with a $\text{Prob} > F$ of 0.0001 and a within R -squared of 0.8106. These findings highlight that educational access plays a vital role in reducing poverty in West Papua..

Keywords: Educational Access, Gini Ratio, Open Unemployment Rate, Poverty, West Papua

1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional karena tidak hanya ditandai oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja. Dalam kerangka Multidimensional Poverty Index (MPI), kemiskinan dipahami sebagai kondisi deprivation dalam berbagai aspek kehidupan yang membatasi kapabilitas individu untuk hidup layak dan

bermartabat (Alkire & Foster, 2011). Kemiskinan berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh sumber daya dan peluang pembangunan.

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan, khususnya di wilayah dengan ketimpangan geografis, sosial, dan ekonomi seperti Papua Barat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Papua Barat pada Maret 2025 mencapai 20,66%, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sekitar 8,47% pada periode yang sama (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan Papua Barat memiliki karakteristik kompleks dan tidak cukup dijelaskan melalui pendapatan.

Kompleksitas tersebut dipengaruhi kondisi geografis berupa pegunungan, lembah, hutan, dan wilayah terpencil yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya distribusi kebutuhan pokok dan memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman (Suryadarma et al., 2021). Keterbatasan akses pendidikan, infrastruktur, dan kesempatan kerja dapat memperkuat kemiskinan. Perkembangan ekonomi Papua Barat menunjukkan peningkatan PDRB per kapita selama 2020–2024. Nilainya meningkat dari 73.933 pada 2020 menjadi 74.022 pada 2021, 78.141 pada 2022, 108.110 pada 2023, dan 131.636 pada 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan perkembangan ekonomi, tetapi belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, kemiskinan perlu dianalisis melalui faktor pendidikan, ketimpangan, dan kesempatan kerja. Akses pendidikan berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan peluang memperoleh pekerjaan produktif. Rasio Gini menggambarkan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan keterbatasan penyerapan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut penting dianalisis untuk memahami dinamika kemiskinan Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat tahun 2020-2024

No	Tahun	Data Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB perkapita
1	2020	73.933
2	2021	74.022
3	2022	78.141
4	2023	108.110
5	2024	131.636

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 73.933. Pada tahun 2021, nilainya meningkat tipis menjadi 74.022, kemudian menjadi 78.141 pada tahun 2022. Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai 108.110, dan kembali meningkat menjadi 131.636 pada tahun 2024. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita merupakan nilai rata-rata sehingga masih memungkinkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama faktor lain yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Kemiskinan merupakan kondisi ketika individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan. Namun, kemiskinan di Papua Barat tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga memiliki karakteristik struktural. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, pekerjaan yang layak, infrastruktur dapat mempertahankan kondisi kemiskinan dalam jangka panjang (Widiastuti, 2010).

Kondisi geografis Papua Barat yang memiliki wilayah pegunungan, hutan, pesisir, dan daerah terpencil turut memengaruhi keterjangkauan layanan dasar. Keterbatasan infrastruktur dan jarak antardaerah dapat menyebabkan akses masyarakat terhadap sekolah, layanan kesehatan, peluang ekonomi menjadi tidak merata. Selain itu, pembangunan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat dapat memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, peningkatan aktivitas ekonomi perlu diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara langsung menurunkan kemiskinan apabila akses pendidikan masih terbatas, distribusi pendapatan belum merata, dan kesempatan kerja belum mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kemiskinan Papua Barat secara lebih mendalam.

Berikut adalah data terkait kemiskinan di Papua barat pada tahun 2024:



Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk miskin di Papua Barat tahun 2024
Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b)

Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin Papua Barat pada September 2024 tercatat sebesar 108,28 ribu jiwa, menurun 1,9 ribu jiwa dibandingkan Maret 2024. Secara agregat, tingkat kemiskinan turun dari 21,66% menjadi 21,09%. Namun, kondisi perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola berbeda. Di perkotaan, tingkat kemiskinan meningkat dari 8,17% menjadi 9,50%, sedangkan di perdesaan menurun dari 27,68% menjadi 26,34%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan, terutama di wilayah perdesaan.

Kondisi antarwilayah menunjukkan pentingnya melihat faktor yang berkaitan dengan kemiskinan. Salah satunya adalah akses pendidikan. Pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sehingga memperbesar peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan dapat menghambat masyarakat memasuki pasar kerja dan meningkatkan risiko kemiskinan.

Penelitian Fattah dan Rahman (2023) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki hubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Artinya, peningkatan pendidikan dapat berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Kondisi pendidikan Papua Barat perlu diperhatikan karena wilayah yang luas dan terpencar dapat menyebabkan perbedaan akses antardaerah. Oleh sebab itu, indikator pendidikan digunakan untuk melihat keterkaitannya dengan kemiskinan Papua Barat. Selain pendidikan, kemiskinan juga berkaitan dengan ketimpangan pendapatan dan ketenagakerjaan. Rasio Gini menggambarkan distribusi pengeluaran masyarakat, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angkatan kerja yang belum terserap. Berikut adalah data Angka Partisipasi Murni Papua Barat tahun 2020–2024.

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni Papua Barat tahun 2020-2024

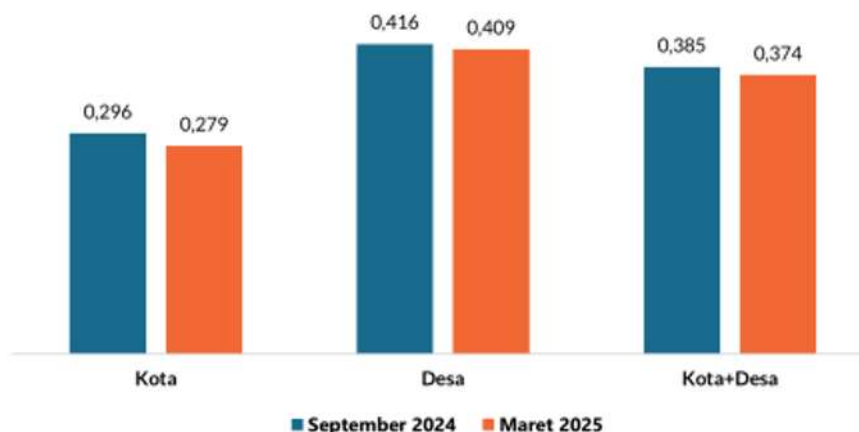
Tahun	Angka Partisipasi Murni berdasarkan tingkat Pendidikan (%)			
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
2020	93.88	70.51	63.62	22.13
2021	94.19	70.52	63.51	22.22
2022	94.31	71.38	63.66	20.67
2023	94.52	74.70	65.92	20.25
2024	94.65	74.81	66.01	20.19

Sumber: Data diolah (2025)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai jenjang usianya. Berdasarkan data Papua Barat tahun 2020–2024, APM SD meningkat dari 93,88% menjadi 94,65%, APM SMP dari 70,51% menjadi 74,81%, dan APM SMA dari 63,62% menjadi 66,01%. Namun, APM perguruan tinggi menurun dari 22,13% pada 2020 menjadi 20,19% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan pada jenjang tinggi masih menghadapi hambatan. Penelitian ini menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator operasional karena tersedia selama 2020–2024. RLS mencerminkan capaian pendidikan kumulatif penduduk usia kerja sehingga relevan dalam menjelaskan kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan. Penelitian Afrianto (2025) menjelaskan bahwa pendidikan memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pendidikan formal dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan serta daya beli. Sebaliknya, keterbatasan sekolah, fasilitas, jarak, biaya, dan kualitas tenaga pendidik dapat menghambat masyarakat memperoleh pendidikan layak.

Selain pendidikan, Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran masyarakat. Nilai mendekati satu menunjukkan ketimpangan lebih tinggi, sedangkan mendekati nol menunjukkan distribusi lebih merata. Di Papua Barat, Gini Ratio Maret 2025 sebesar 0,374. Ketimpangan dapat memperbesar risiko kemiskinan apabila masyarakat berpendapatan rendah tidak memperoleh manfaat pembangunan secara merata (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b).

Gambar 2. Gini Ratio Provinsi Papua Barat September 2024 - Maret 2025 menurut Daerah Tempat Tinggal



Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2025b)

Berdasarkan grafik Gini Ratio, ketimpangan pengeluaran Papua Barat mengalami penurunan pada September 2024 hingga Maret 2025. Di perkotaan, Gini Ratio turun dari 0,296 menjadi 0,279, sedangkan perdesaan turun dari 0,416 menjadi 0,409. Secara agregat, nilainya menurun dari 0,385 menjadi 0,374. Meskipun menunjukkan

perbaikan distribusi pengeluaran, ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terlihat. Putra et al. (2021) menemukan bahwa Gini Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum bekerja. Tingginya pengangguran dapat menurunkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan (Gozali & Nurikmah, 2025). Hal ini penting untuk pengentasan kemiskinan daerah.



Gambar 3. Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Papua Barat, Februari 2025
Sumber: (BPS Provinsi Papua Barat, 2025a)

Berdasarkan data, TPT Papua Barat pada Februari 2025 sebesar 4,21%, naik 0,08 persen poin dibandingkan Agustus 2024. Di perkotaan, TPT turun dari 5,32% menjadi 4,32%, sedangkan perdesaan meningkat dari 3,54% menjadi 4,16%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tekanan pengangguran menyebar antara wilayah kota dan desa. Keterbatasan kesempatan kerja produktif dapat menurunkan pendapatan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan ekonomi, sehingga pengangguran menjadi faktor yang berkaitan dengan kemiskinan. Hutabarat et al. (2025) menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kemiskinan Papua Barat menjadi persoalan meskipun PDRB per kapita meningkat. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses pendidikan yang belum merata, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Keterbatasan pendidikan berkualitas dapat menghambat pengembangan modal manusia, sedangkan ketimpangan menunjukkan manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata. Pemilihan Papua Barat sebagai objek penelitian didasarkan pada tingkat kemiskinan yang tinggi, karakteristik geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penelitian kemiskinan di Papua Barat juga terbatas dibandingkan wilayah lain.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap kemiskinan Papua Barat tahun 2020–2024 menggunakan data panel. Penelitian diharapkan menggambarkan keterkaitan langsung ketiga faktor dengan kemiskinan serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pemerataan pendidikan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan kesempatan kerja.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator akses pendidikan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sedangkan variabel dependen adalah tingkat kemiskinan di Papua Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh data kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat selama periode 2020–2024. Sampel menggunakan seluruh kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah penelitian dan seluruh tahun pengamatan. Provinsi Papua Barat terdiri atas tujuh kabupaten, yaitu Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk

Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Dengan tujuh kabupaten dan lima tahun pengamatan, jumlah observasi penelitian adalah 35 data.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk menjelaskan cara setiap variabel diukur. RLS merupakan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang ditempuh penduduk dan dinyatakan dalam tahun. Rasio Gini merupakan indikator ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dan dinyatakan dalam indeks. TPT menunjukkan persentase angkatan kerja yang belum bekerja dan dinyatakan dalam persen. Kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin dan dinyatakan dalam persen. Seluruh variabel diamati pada periode 2020–2024. Variabel RLS, Rasio Gini, dan TPT merupakan variabel independen, sedangkan kemiskinan merupakan variabel dependen.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan terutama menggunakan teknik dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder. Data penelitian meliputi RLS, Rasio Gini, TPT, dan tingkat kemiskinan Papua Barat tahun 2020–2024. Sumber utama data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat dan publikasi resmi yang relevan. Data tersebut digunakan untuk membentuk data panel kabupaten/kota dan tahun pengamatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya digunakan regresi data panel, yaitu analisis yang menggabungkan data cross section dan time series. Estimasi dilakukan melalui Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model dilakukan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk memilih CEM atau FEM. Jika probabilitas lebih dari 0,05, CEM dipilih, sedangkan jika kurang dari 0,05, FEM dipilih. Uji Hausman digunakan untuk memilih FEM atau REM. Probabilitas lebih dari atau sama dengan 0,05 menunjukkan REM, sedangkan probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan FEM. Uji LM digunakan untuk menentukan CEM atau REM berdasarkan nilai probabilitas.

Selanjutnya dilakukan uji asumsi untuk menilai kelayakan model, meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan Wooldridge. Hasil pengujian menunjukkan $F(1,6)=8,840$ dengan $\text{Prob} > F=0,0249$, sehingga terdapat autokorelasi orde pertama. Oleh karena itu, model akhir menggunakan Fixed Effect Model dengan cluster robust standard error. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh RLS, Rasio Gini, dan TPT terhadap kemiskinan. Pengujian hipotesis meliputi koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen menjelaskan variasi kemiskinan. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Dengan tingkat signifikansi 5%, nilai probabilitas kurang dari atau sama dengan 0,05 menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan nilai lebih dari 0,05 menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisa Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil analisa statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Std. Dev	Min	Maks
<i>TK</i>	35	25,27829	6.182961	14.41	34.7
<i>RLS</i>	35	7,738	1.249783	5.12	9.35
<i>GINI</i>	35	.3749143	.0332259	.268	.425
<i>TPT</i>	35	4,117714	2.651917	.12	11.45

Sumber : Stata MP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh gambaran mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel *TK* (Tingkat Kemiskinan) memiliki nilai minimum sebesar 14,41 dan nilai maksimum sebesar 34,70. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 25,27829 menunjukkan bahwa secara umum nilai variabel *Y* berada pada kisaran 25,28%. Standar deviasi sebesar 6,182961 menunjukkan bahwa penyebaran data variabel *TK* relatif cukup besar, sehingga terdapat variasi tingkat kemiskinan yang cukup beragam antar kabupaten/kota.
2. Variabel *RLS* (Akses Pendidikan/Rata-rata Lama Sekolah) memiliki nilai minimum sebesar 5,12 tahun dan nilai maksimum sebesar 9,35 tahun. Nilai rata-rata sebesar 7,738 menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Papua Barat menempuh pendidikan formal selama kurang lebih 7,74 tahun. Standar deviasi sebesar 1,249783 mengindikasikan bahwa penyebaran data tergolong sedang, sehingga capaian pendidikan antar kabupaten/kota memiliki variasi yang cukup terlihat namun tidak ekstrem.
3. Variabel *GINI* (Rasio Gini) memiliki nilai minimum sebesar 0,268 dan nilai maksimum sebesar 0,425. Nilai rata-rata sebesar 0,374914 menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan di Papua Barat berada pada kisaran 0,375. Standar deviasi sebesar 0,033226 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga nilai Rasio Gini antar kabupaten/kota cenderung homogen atau tidak terlalu bervariasi.
4. Variabel *TPT* (Tingkat Pengangguran Terbuka) memiliki nilai minimum sebesar 0,12% dan nilai maksimum sebesar 11,45%. Nilai rata-rata sebesar 4,117714 menunjukkan bahwa secara umum nilai *TPT* berada pada kisaran 4,12%. Standar deviasi sebesar 2,651917 menunjukkan bahwa data *TPT* memiliki tingkat penyebaran yang cukup tinggi dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga terdapat perbedaan tingkat pengangguran yang cukup besar antar kabupaten/Kota.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Common Effect Model

Common Effect Model (CEM) atau *Pooled Least Square* merupakan model yang mengasumsikan bahwa data panel bersifat homogen, sehingga tidak terdapat perbedaan karakteristik antar individu maupun waktu. Model ini menganggap bahwa intersep dan koefisien regresi adalah sama untuk seluruh unit pengamatan, serta tidak memperhatikan adanya efek individu maupun efek waktu (Widarjono, 2018). Hasil estimasi model regresi data panel *common effect* model ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Estimasi Model *Common Effect*

Variabel	Koefesien	Std. Error	T statistik	Prob
C	62,0600	8,0188	7,7393	0.0000
<i>RLS</i>	-3,8837	0,8566	-4,5336	0,0001
<i>GINI</i>	-19,4210	22,6590	-0,8571	0,3980
<i>TPT</i>	0,1339	0,3756	0,3565	0,7239
R-squared	: 0,6332			
Adjusted R-squared	: 0,5977			

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, hasil estimasi menggunakan Common Effect Model (CEM) menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0001, yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Sementara itu, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3980 dan 0,7239, yang lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Fixed Effect Model

Tabel 3. Estimasi Model *Fixed Effect*

Variabel	Koefesien	Std. Error	T statistik	Prob
C	59,07203	3,756922	15,72	0,000
RLS	-4,029706	0,432612	-9,31	0,000
GINI	-5,587603	4,436576	-1,26	0,220
TPT	-0,125557	0,077556	-1,62	0,118
R-squared (within)		: 0,8106		
R-squared (between)		: 0,6180		
R-squared (overall): 0,6222		: 0,6222		
F(3,25) = 35,67		Prob > F = 0,0000		

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, hasil estimasi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Sementara itu, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0,220 dan 0,118, yang lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga pada standard error non-robust ini kedua variabel tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Random Effect Model

Tabel 4. Estimasi Model *Random Effect*

Variabel	Koefesien	Std. Error	T statistik	Prob
C	58,8470	3,9901	14,748	0,000
RLS	-3,9991	0,3963	-10,092	0,000
GINI	-5,6722	4,2277	-1,342	0,190
TPT	-0,1207	0,0724	-1,667	0,106
R-squared (within)		: 0,8106		
R-squared (overall)		: 0,7988		

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4, hasil estimasi menggunakan *Random Effect Model* (REM) menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 (5%). Sementara itu, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing memiliki nilai probabilitas sebesar 0,190 dan 0,106, yang lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian menggunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Hasil dari uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistik	d.f.	Prob.	Kesimpulan
F test that all u _i =0	346,00	(6, 25)	0,0000	<i>Fixed effect</i>

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 5 hasil Uji Chow menunjukkan Nilai Prob sebesar $0,0000 < 0,05$ menyebabkan H_0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*, dan pengujian dilanjutkan ke Uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Hausman

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	d.f.	Prob.	Kesimpulan
Cross-section random	25,37	2	0,0000	<i>Fixed effect</i>

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Tabel 6 menunjukkan nilai Nilai Prob sebesar $0,0000 < 0,05$ menyebabkan H_0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Lagrange Multiplier

Uji LM tidak dilakukan karena Uji Chow dan Uji Hausman telah sepakat menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*, sesuai kriteria pada Bab III.6.3.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan *Wooldridge test for autocorrelation in panel data*, dengan hipotesis H_0 : tidak ada autokorelasi orde pertama.

Tabel 7 Uji Autokorelasi

F-statistic	df	Prob > F
8,840	(1, 6)	0,0249

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Nilai *Prob > F* sebesar $0,0249 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Artinya, terdapat autokorelasi orde pertama pada model. Menurut Gujarati (2010), autokorelasi menyebabkan estimator OLS tetap tidak bias namun tidak lagi efisien, sehingga standard error yang dihasilkan menjadi tidak valid untuk pengujian hipotesis. Masalah ini telah diantisipasi dengan menggunakan estimasi *Fixed Effect Model* dengan *cluster robust standard error* pada model regresi final, sehingga standard error tetap valid meskipun terdapat autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>RLS</i>	<i>GINI</i>	<i>TPT</i>
<i>RLS</i>	1,0000		
<i>GINI</i>	0,4403	1,0000	
<i>TPT</i>	0,7344	0,2618	1,0000

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Variabel	VIF	1/VIF
<i>RLS</i>	2,53	0,394580
<i>GINI</i>	2,19	0,455917
<i>TPT</i>	1,25	0,797923
Mean VIF	1,99	-

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Seluruh koefisien korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,85 (nilai tertinggi 0,7344 antara X1 dan X3), dan seluruh nilai VIF berada di bawah 10 (Mean VIF = 1,99). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Effects Test	Chi-Sq. Statistic	d.f.	Prob. > chi2
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg	4,04	1	0,0444

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Nilai Prob > chi2 sebesar 0,0444 < 0,05 menyebabkan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, estimasi akhir model Fixed Effect pada penelitian ini menggunakan Robust/Cluster Standard Error (cluster berdasarkan kabupaten/kota) agar hasil estimasi tetap konsisten dan pengujian statistik menjadi lebih valid (Gujarati, 2010).

Analisa Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman (Bagian 4.3), model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Tabel 10 Hasil Regresi Fixed Effect - Cluster Robust (Model Final)

Variabel	Koefesien	Std. Error	T statistik	Prob
C	59,07203	4,275035	13,82	0,000
<i>RLS</i>	-4,029706	0,446334	-9,03	0,000
<i>GINI</i>	-5,587603	2,667739	-2,09	0,081
<i>TPT</i>	-0,125557	0,047400	-2,65	0,038
R-squared (within)	: 0,8106			
F(3,25) = 35,67	Prob > F = 0,0000			
sigma_u	: 4,0561659			
sigma_e	: 0,4763356			
rho	: 0,9864 (98,64% variasi dijelaskan oleh perbedaan antar kabupaten/kota)			

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = C(1) + C(2)*RLS + C(3)*GINI + C(4)*TPT$$

$$TK = 59,07203 - 4,029706*RLS - 5,587603*GINI - 0,125557*TPT$$

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13980>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Adapun interpretasi dari persamaan diatas yaitu:

1. Konstanta (C) sebesar 59,07203 menunjukkan bahwa apabila Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Rasio Gini (GINI), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai nol, maka Tingkat Kemiskinan (Y) diperkirakan sebesar 59,07203.
2. Koefisien RLS sebesar $-4,029706$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun Rata-rata Lama Sekolah akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 4,03 satuan (*ceteris paribus*). Pengaruh ini signifikan ($\text{Prob} = 0,000 < 0,05$).
3. Koefisien GINI sebesar $-5,587603$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Rasio Gini akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 5,59 satuan (*ceteris paribus*). Namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik ($\text{Prob} = 0,081 > 0,05$).
4. Koefisien TPT sebesar $-0,125557$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan Tingkat Pengangguran Terbuka akan menurunkan Tingkat Kemiskinan sebesar 0,13 satuan (*ceteris paribus*). Pengaruh ini signifikan ($\text{Prob} = 0,038 < 0,05$), meskipun arah negatif berbeda dengan teori ekonomi konvensional.

Interpretasi Efek Individual (Fixed Effect)

Tabel 11 Nilai Intersep Individual (α_i) Kabupaten/Kota di Papua Barat

No.	Kabupaten/Kota	α_i
1	Kaimana	53,10029
2	Manokwari	56,70637
3	Pegunungan Arfak	56,85126
4	Manokwari Selatan	58,34962
5	Fakfak	61,43752
6	Teluk Wondama	61,70362
7	Teluk Bintuni	65,35553

Sumber : StataMP 14.2 Data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 11, Teluk Bintuni memiliki nilai intersep tertinggi ($\alpha_i = 65,36$). Nilai ini mengindikasikan bahwa, dengan mengontrol pengaruh RLS, Rasio Gini, dan TPT, Teluk Bintuni memiliki tingkat kemiskinan dasar yang paling tinggi di antara ketujuh kabupaten/kota yang diteliti. Kondisi ini diduga berkaitan dengan karakteristik struktural wilayah yang bersifat tetap, seperti ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif (migas) yang cenderung bersifat *enclave* dan kurang memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal, ditambah kondisi geografis yang relatif terisolasi sehingga distribusi kesejahteraan antarkecamatan menjadi tidak merata meskipun indikator makro seperti TPT relatif terkendali.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi atau *Adjusted R2* menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R-squared (within) dari model Fixed Effect sebesar 0,8106 (81,06%), menunjukkan bahwa variabel Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Gini, dan TPT mampu menjelaskan 81,06% variasi Tingkat Kemiskinan dalam masing-masing kabupaten/kota dari waktu ke waktu. Sisanya sebesar 18,94% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Bersama (Uji F)

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 15 di atas, nilai $F(3,6) = 51,56$ dengan $\text{Prob} > F = 0,0001 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Gini, dan TPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 15 (model final Fixed Effect dengan Cluster-Robust Standard Error, dengan t-tabel $df = 6$ sebesar 2,447 pada $\alpha = 5\%$), maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel Rasio Gini (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar -2,09 (nilai absolut lebih kecil dari t tabel yaitu 2,447) dan nilai signifikansi $0,081 > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel Rasio Gini (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Meskipun koefisien regresi bernilai negatif (-5,587603), yang menunjukkan bahwa peningkatan Rasio Gini cenderung menurunkan Kemiskinan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik pada taraf 5%, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Rasio Gini memengaruhi Kemiskinan secara nyata.
2. Hasil uji t pada variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar -9,03 (nilai absolut lebih besar dari t tabel yaitu 2,447) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Koefisien regresi yang bernilai -4,029706 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun Rata-rata Lama Sekolah akan menurunkan Kemiskinan sebesar 4,029706 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Hasil uji t pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar -2,65 (nilai absolut lebih besar dari t tabel yaitu 2,447) dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Koefisien regresi yang bernilai -0,125557 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan TPT cenderung menurunkan Kemiskinan sebesar 0,125557 satuan. Namun, arah pengaruh negatif ini berbeda dengan teori ekonomi konvensional, yang umumnya menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka semakin tinggi tingkat kemiskinan. Perbedaan hasil ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pasar tenaga kerja Papua Barat, di mana TPT hanya mengukur penduduk yang tidak bekerja namun aktif mencari kerja, sementara sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal, pertanian tradisional, atau usaha subsisten yang tidak tergolong pengangguran terbuka namun tetap berpotensi mengalami kemiskinan.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Gini terhadap Tingkat Kemiskinan Papua Barat Tahun 2020–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Gini berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2020–2024. Berdasarkan uji parsial pada model Fixed Effect dengan Cluster-Robust Standard Error, Rasio Gini memiliki koefisien sebesar -5,587603, nilai t-hitung -2,09, dan signifikansi 0,081. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh Rasio Gini terhadap kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan Rasio Gini cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, tetapi hubungan tersebut belum cukup kuat untuk dibuktikan secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan ketimpangan pendapatan bukan faktor utama yang menjelaskan perubahan kemiskinan selama periode penelitian. Kemiskinan di Papua Barat juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja, perlindungan sosial, serta karakteristik ekonomi masing-masing kabupaten. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan tidak berdiri sendiri. Upaya pengurangan kemiskinan perlu memperhatikan pemerataan pembangunan, peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan, serta penyediaan layanan dasar. Kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi antarwilayah diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan di Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan distribusi pendapatan belum tentu langsung mengubah kondisi kemiskinan masyarakat, terutama ketika terdapat hambatan struktural dan geografis antarwilayah di Papua.

Pengaruh Akses Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Papua Barat Tahun 2020–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2020–2024. Berdasarkan uji parsial pada model Fixed Effect dengan Cluster-Robust Standard Error, akses pendidikan memiliki koefisien sebesar -4,029706, nilai t-hitung -9,03, dan

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa akses pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien negatif berarti peningkatan akses pendidikan cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini sesuai dengan teori human capital yang menempatkan pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Dalam konteks Papua Barat, akses pendidikan masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah pedalaman, kepulauan, dan daerah terpencil. Keterbatasan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta kondisi geografis dapat membatasi kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan yang layak. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih baik. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perluasan bantuan pendidikan menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Peningkatan akses pendidikan juga perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua Barat serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang di daerah.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Papua Barat Tahun 2020–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2020–2024, tetapi memiliki arah hubungan negatif. Berdasarkan uji parsial pada model Fixed Effect dengan Cluster-Robust Standard Error, TPT memiliki koefisien sebesar -0,125557, nilai t-hitung -2,65, dan signifikansi 0,038. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa TPT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien negatif berarti peningkatan TPT cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini berbeda dengan dugaan teoritis bahwa peningkatan pengangguran dapat menurunkan pendapatan dan meningkatkan risiko kemiskinan. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik sosial ekonomi Papua Barat. TPT hanya mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, sedangkan sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal, pertanian tradisional, perikanan, atau usaha keluarga dengan pendapatan rendah. Kelompok tersebut tidak termasuk pengangguran terbuka, tetapi tetap dapat mengalami kemiskinan. Selain itu, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan akses layanan dasar juga dapat memengaruhi kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, hubungan TPT dan kemiskinan perlu dipahami dengan mempertimbangkan struktur ekonomi, karakteristik pekerjaan, dan kondisi sosial masyarakat Papua Barat selama periode penelitian. Rendahnya TPT tidak selalu menunjukkan rendahnya kemiskinan apabila pekerjaan yang tersedia memiliki pendapatan rendah serta tidak memberikan pendapatan yang cukup bagi rumah tangga miskin.

Pengaruh Akses Pendidikan, Rasio Gini, dan TPT Secara Bersama-Sama terhadap Kemiskinan Papua Barat Tahun 2020–2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akses Pendidikan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2020–2024. Berdasarkan uji simultan pada model Fixed Effect dengan Cluster-Robust Standard Error, diperoleh nilai $F(3,6)$ sebesar 51,56 dengan $\text{Prob} > F$ sebesar 0,0001. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua Barat tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi yang saling berhubungan. Secara parsial, akses pendidikan dan TPT terbukti signifikan, sedangkan Rasio Gini tidak signifikan. Meskipun demikian, Rasio Gini tetap menjadi bagian dalam model ketika ketiga variabel dianalisis secara bersama-sama. Nilai R-squared within sebesar 0,8106 menunjukkan bahwa 81,06% variasi tingkat kemiskinan dalam kabupaten dari waktu ke waktu dapat dijelaskan oleh Akses Pendidikan, Rasio Gini, dan TPT. Sementara itu, 18,94% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, kesehatan, infrastruktur, investasi, dan inflasi. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan perlu memperhatikan pendidikan, kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan antarwilayah secara bersama-sama untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing wilayah di Papua Barat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel mengenai pengaruh Rasio Gini, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2020–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Rasio Gini tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2020–2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,081, yang lebih

besar dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Rasio Gini berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan ditolak. Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan negatif dan nilai probabilitasnya relatif mendekati ambang signifikansi, pengaruh tersebut belum dapat dinyatakan signifikan secara statistik pada taraf 5%. 2). Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2020–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah masyarakat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa RLS berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan diterima. 3). Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2020–2024. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,038, yang lebih kecil dari 0,05. Meskipun arah koefisien negatif berbeda dengan teori ekonomi konvensional yang umumnya menyatakan hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi Papua Barat, khususnya dominasi sektor informal, menyebabkan hubungan tersebut berbeda selama periode penelitian. Dengan demikian, hipotesis H3 yang menyatakan bahwa TPT berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan ditolak dari sisi arah, meskipun pengaruhnya terbukti signifikan secara statistik. 4). Akses Pendidikan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat Tahun 2020–2024. Hal ini dibuktikan dengan nilai $F(3,6)$ sebesar 51,56 dan nilai signifikansi sebesar 0,0001, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perubahan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat, dengan kemampuan menjelaskan (R -squared within) sebesar 81,06%.

Reference

1. Afrianto, Y. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2023. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(1), 82–88.
2. Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
3. Andani, D., Fitriani, D. R., Subang, U., Padjajaran, U., Publik, K., & Publik, A. (2025). Fenomena Kemiskinan Dan Respons Kebijakan Publik Di Wilayah Subang Utara. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
4. Aprilia, O. (2024). Kemiskinan: Pengertian Menurut Para Ahli. <https://www.rsubidadari.co.id/Pengertian-Kemiskinan-Menurut-Para-Ahli/>
5. Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2011). *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*. PublicAffairs.
6. BPS. (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. <https://www.bps.go.id/Id/Pressrelease/2023/07/17/2016/Profil-Kemiskinan-Di-Indonesia-Maret-2023.html>.
7. BPS Provinsi Papua Barat. (2025a). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat Februari 2025 (Issue 71).
8. BPS Provinsi Papua Barat. (2025b). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Papua Barat Maret 2025. <https://papuabar.bps.go.id/Id/Pressrelease/2025/07/25/1141/Persentase-Penduduk-Miskin-Papua-Barat-Pada-Maret-2025-Sebesar-20-66-Persen--Menurun-0-43-Persen-Poin-Terhadap-September-2024-.html>.
9. Fattah, S., & Rahman, A. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 145–158.
10. Fitriani, Rusla, Budiman, H., Wibawa, G. A., Somayasa, & Wayan. (2024). Pemodelan Angka Kemiskinan Menggunakan Regresi Data Panel Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Matematika, Komputasi Dan Statistika*, 4(2), 652–662.
11. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: UNDIP. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780>
12. Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 4(1), 35–46.
13. Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31.
14. Gozali, N., & Nurikmah, J. (2025). The Impact of the Open Unemployment Rate on the Poverty Rate in Indonesia from 2014 to 2023. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 8(1), 1–17.
15. Gujarati, D. N. (2010). *Essentials of Econometrics* (4th ed). McGraw-Hill Education.
16. Hisyam, C. J., Making, E. K., Pratama, R. A. A., Priambodo, R., Baihaqqi, R. F., & Ravelia, V. (2025). Kemiskinan Terhadap Masyarakat Marginal : Studi Kasus di Pemukiman Pemulung Wilayah Bintara Jaya , Bekasi Barat. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 307–321.
17. Hutabarat, F. B., Lubis, E. H., & Suharianto, J. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Utara (2001-2023) The Influence of Open Unemployment Rate (TPT), Human Development Index (HDI), and Inflation on P. JIIC: *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5667–5677.
18. Jordan, K., & Mardjono, E. S. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dilihat dari Proporsi Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat 2018-2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(2), 230–239.
19. Kesumawati, Nila, dkk. (2017). *Pengantar Statistika Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
20. Maharani, A., Raihan, A. F., Hidayatullah, M. R., & Putra, A. R. (2025). Analisis Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 514–526.
21. Miftahussalam, M., & Rofiuddin, M. (2021). Pengaruh PDRB indeks pembangunan manusia dan zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 40–54.
22. Novirsari, E. (2025). Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah 3T dan Dampaknya terhadap Mobilitas Sosial Generasi Muda. *Applied Multidisciplinary Science (AMS)*, 1(1).
23. Nur, R., Lingga, S., Matematika, P. S., Matematika, F., & Padang, U. N. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13980>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Utara Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 18054–18064.
24. Putra, H. P., Diaudin, M., Fahrudin, R., & Suwanan, A. F. (2021). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio Dan Pertumbuhan Pdrb Perkapita Terhadap Angka Kemiskinan Di Kota Blitar Tahun 2011-2020. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 18(2), 152–161.
25. Putri A., R. M., & Azise, R. (2024). Kemiskinan, Pengangguran, UMP, dan Ekonomi terhadap IPM di Riau. *Jurnal Ekonomi Riau*, 5(1), 88–101.
26. Ramadhan, R. (2024). Pengaruh Tingkat Ketimpangan (Gini Ratio) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2022. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(01), 108–118.
27. Sarpin, Ridwan, H., Roslan, S., & Tanzil. (2025). Kerentanan sosial dan kemiskinan multidimensi rumah tangga miskin. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 6(November), 205–218.
28. Sholeh, M. (2022). Pengaruh Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga, Dan Akses Informasi Terhadap Kemiskinan Di Idonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 19(1).
29. Suryadarma, D., Poesoro, A., & Budiyati, S. (2021). The Dynamics of Poverty in Papua: A Panel Data Analysis. *SMERU Research Institute*.
30. Ubaidillah, M. R. S. Al, & Yasin, M. (2024). Analisis Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia Jenis-Jenis Pengangguran. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 34–42.
31. Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten / Kota di Tiga Provinsi Termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720–16729.
32. Widiastuti, T. (2010). Kemiskinan Informasi. *Lmu Komunikasi*, 8(3), 314–329.
33. Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
34. World Bank. (2023). Ending Poverty: The Road to 2030. <https://www.worldbank.org/en/events/2017/03/21/ending-poverty-the-road-to-2030>